



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 183 /KMK.01/2017

TENTANG

PENETAPAN

DUTA TRANSFORMASI DAN KOORDINATOR DUTA TRANSFORMASI
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, diperlukan dukungan manajemen perubahan (*change management*) yang efektif;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung manajemen perubahan (*change management*) yang efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memastikan bahwa para pemangku kepentingan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan terlibat dan mendukung Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
 - c. bahwa dalam rangka memastikan keterlibatan dan dukungan para pemangku kepentingan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menugaskan beberapa pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai duta transformasi dan koordinator duta transformasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Duta Transformasi dan Koordinator Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;

—*a*—



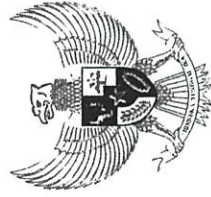
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.01/2017 tentang Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2017-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN DUTA TRANSFORMASI DAN KOORDINATOR DUTA TRANSFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2017.
- PERTAMA : Menetapkan Duta Transformasi dan Koordinator Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Duta Transformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi, membantu terlaksananya proses perubahan dalam kaitannya dengan implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - b. melakukan pengumpulan umpan balik, baik dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal Kementerian Keuangan terkait implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
 - c. berpartisipasi dalam kegiatan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, baik yang diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office/CTO*) maupun Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office/PMO*);
 - d. menjadi penghubung antara CTO dan PMO dengan pegawai Kementerian Keuangan dalam menyampaikan pesan perubahan dan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
 - e. menjadi panutan (*role model*) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menerapkan inisiatif dan menunjukkan pola pikir yang semakin berfokus pada layanan pelanggan sebagai bentuk dukungan terhadap Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

f. Menjadi panutan (*role model*) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai perwujudan budaya Kementerian Keuangan.

KETIGA : Koordinator Duta Transformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA selain memiliki tugas yang sama dengan Duta Transformasi sebagaimana Diktum KEDUA, juga memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menjadi penghubung antara CTO dan PMO dengan Duta Transformasi dalam meneruskan informasi terkait implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan; dan
- b. mengkoordinasikan program manajemen perubahan para Duta Transformasi terkait implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

KEEMPAT : CTO dan PMO melakukan pembinaan dan memantau pelaksanaan tugas Duta Transformasi dan Koordinator Duta Transformasi.

KELIMA : Dalam hal terdapat perubahan nama-nama Duta Transformasi dan Koordinator Duta Transformasi, perubahan atas Keputusan Menteri ini ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

KEENAM : Masa kerja Duta Transformasi dan Koordinator Duta Transformasi dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Para Staf Ahli Menteri Keuangan;
4. Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

200



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
8. Ketua *Project Management Office* di lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Para Duta Transformasi Kelembagaan dan Koordinator Duta Transformasi untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

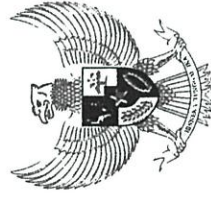
SRI MULYANI INDRAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



ARIP BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

→ M

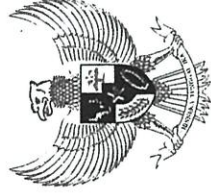


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DUTA TRANSFORMASI DAN KOORDINATOR DUTA TRANSFORMASI
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2017

A. DUTA TRANSFORMASI

No.	Nama	NIP	Unit Kerja
1.	Florentinus Eko Yulianto	197601072002121001	Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal (Setjen)
2.	Krishna Pandu Pradana	198701032010121002	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Setjen
3.	Luh Putu Rina Maharani	199007222015022002	Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Setjen
4.	Muhammad Hafizullah Lubis	199012172013101001	Sekretariat Pengadalan Pajak, Setjen
5.	Niczen Henry Lolowang	198704042009121002	Biro Perlengkapan, Setjen
6.	Nur Muhlisin	199203222014111001	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Setjen
7.	Rostinyde Simarmata	198105262002122001	Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Setjen
8.	Syena Idfilandu	199204052014111001	Biro Umum, Setjen
9.	Tri Susilo	198905062015031034	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Setjen
10.	Dian Utami Ningsih	198609092010122004	Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
11.	Ida Ayu Made Pratiwi Indhira Hapsari	198511052009012005	Direktorat Sistem Penganggaran, DJA
12.	Muhamad Rahmat	198909202012101001	Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, DJA
13.	Adrian Septiadi Putra	199209152014111004	KPP Pratama Argamakmur, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
14.	Afrizal Kurniawan	199210062014111005	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, DJP
15.	Agil Haryadi Budiana	198901122014021001	KPP Pratama Sekayu, DJP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Nama	NIP	Unit Kerja
16.	Alpha Nur Setyawan Pudjono	198212142004121001	Direktorat Transformasi Proses Bisnis, DJP
17.	Arief Setiawan	198302232004121002	KPP Pratama Sleman, DJP
18.	Arwan Meiantoro	199305272013101001	Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, DJP
19.	Ayu Norita Wuryansari	196711181995032001	KPP Pratama Sidoarjo Selatan, DJP
20.	Beni Setyawan	198401252003121003	KPP Pratama Kepanjen, DJP
21.	Budianto Napoh	198405202003121003	KPP Pratama Mampang Prapatan, DJP
22.	Dendi Amrin	197511281995021001	KPP Penanaman Modal Asing Lima, DJP
23.	Didik Yandiawan	198412152003121004	Direktorat Transformasi Proses Bisnis, DJP
24.	Dony Saputro	198707262008121004	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, DJP
25.	Endro Dwi Subandono	199201292013101001	KPP Pratama Mamuju, DJP
26.	I Gusti Ngurah Agung Hadiningrat	197807022002121001	KPP Pratama Kupang, DJP
27.	M. Syarif Mansur	198409062004121001	KPP Pratama Gresik Utara, DJP
28.	Meidiawan Cesarian Syah	198905092009121001	Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, DJP
29.	Muhammad Arief	198412042007011001	Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, DJP
30.	Muhammad Yudhy Guztaman	198006252010121003	KPP Pratama Dumai, DJP
31.	Nova Devi Siska Presnita Saragih	198801242009122004	KPP Pratama Tebing Tinggi, DJP
32.	Nurul Arsyianti Arsyad	19750330199112001	KPP Pratama Mataram Barat, DJP

—
AN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Nama	NIP	Unit Kerja
33.	Rima Lourentia	198806142008122001	KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan, DJP
34.	Sardana	197103161992011001	Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, DJP
35.	Sri Lestari Pujiastuti	197503021995032001	KPP Pratama Pontianak, DJP
36.	Sudramono Manihuruk	198803132009121002	KPP Pratama Penanaman Modal Asing Empat, DJP
37.	Alfiandi	199304172015021001	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
38.	Beni Novri	197111281999031001	Direktorat Kepatuhan Internal, DJBC
39.	Bima Raspati	199101162010011001	KPPBC TMP B Bandar Lampung, DJBC
40.	Fanny Primasari Yulianti	199207182014112001	Direktorat Kepabeanaan Internasional dan Antar Lembaga, DJBC
41.	Herwin	199301122012121002	Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta, DJBC
42.	Lalu Faisal Amri Rahman	198605222010121004	Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai, DJBC
43.	Mahmud Zein Firman syah	198405202009011010	Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
44.	Marsanto Adi Nurcahyo	198009202001121003	KPPBC TMP C Jayapura, DJBC
45.	Muhammad Syarif Hasibuan	198606192009121011	Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, DJBC
46.	Rommy Heryadi	198105082002121002	KPPBC TMP B Tarakan, DJBC
47.	Seven Julianus Siregar	198407032009011004	Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai, DJBC

24

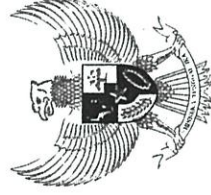


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Nama	NIP	Unit Kerja
48.	Sidig Wardoyo	198611282015021001	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam, DJBC
49.	Souvenir Yustianto	197106101990121001	KPPBC TMP C Entikong, DJBC
50.	Taufik Ismail	198905282010121004	Sekretariat Direktorat, DJBC
51.	Teguh Djatmiko	197107191992011003	KPPBC Tipe A Tanjung Priok, DJBC
52.	Yazid Khair Harson	198110212002121004	KPPBC TMP B Teluk Bayur, DJBC
53.	Abd Gafur	198504292003121001	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN)
54.	Agung Ariwibowo	199010052013101001	Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara, DJPBN
55.	Agus Hari Wibowo	198203132002121001	KPPN Pekanbaru, DJPBN
56.	Andreas Senna Ndaramta	199206262014111002	KPPN Lhokseumawe, DJPBN
57.	Arya Dwari Rahmani	199308062014111002	KPPN Palembang, DJPBN
58.	Bachrul Ulum	198304072004121002	Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Kalimantan Barat, DJPBN
59.	Bagus Mengku Negara	199209152014111001	KPPN Muara Bungo, DJPBN
60.	Daniel Ramos	199204112014111002	KPPN Wamena, DJPBN
61.	Edwin Hayadi	199010072012101004	KPPN Mukomuko, DJPBN
62.	Gema Otheliansyah	199310072014111001	KPPN Lubuk Linggau, DJPBN
63.	Muchammad Ilham Dewa Saputra	199202272014111001	KPPN Dumai, DJPBN

20

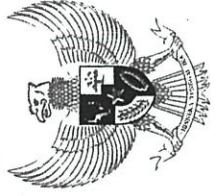


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Nama	NIP	Unit Kerja
64.	Muhammad Fahmi Trisnadi	199207262014111002	KPPN Poso, DJPBN
65.	Ridha Fithri Fathonah	198510182010122006	Sekretariat DJPBN
66.	Rifqi Ahmaddzun N.	199204202013101003	KPPN Bima, DJPBN
67.	Wiwik S. Yudiningsih	197609181996022001	KPPN Bekasi, DJPBN
68.	Yudho Bintoro Sandi	199206232014111001	KPPN Sekayu, DJPBN
69.	Ahmad Indra Gunawan	198207022003121003	KPKNL Palopo, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
70.	Ahmad Zainur Rhofiqin	198906202014021003	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, DJKN
71.	Akbar Satrio Wibowo	198905302010121001	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, DJKN
72.	Anggriyan Setyono	198709072015021001	Direktorat Penilaian, DJKN
73.	Dana Kristiawan	198407022003121004	Sekretariat DJKN
74.	Lusia Agasty Prihantika	198806152012122001	Sekretariat DJKN
75.	Marwan Riyandi	198512022007101003	Sekretariat DJKN
76.	Ryan Eka Prasetya	198908232014021004	KPKNL Denpasar, DJKN
77.	Andhika Diskartes	198707012008121002	Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
78.	Beny Trias Oktora	197810222000121001	Direktorat Dana Perimbangan, DJPK
79.	Lilzam Nuur	199106082014111001	Sekretariat DJPK
80.	Dwi Irianti Hadiningdyah	196606221990102001	Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR
81.	Ramli Indrasyah Lubis	197809162002121001	Direktorat Surat Utang Negara, DJPPR
82.	Muhammad Syukri Duwila	199002132014111001	Sekretariat Inspektorat Jenderal (Itjen)
83.	M. Hisyam Haikal	197006201991031001	Sekretariat Itjen

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Nama	NIP	Unit Kerja
84.	Riska Widya Ningrum	199206062014112002	Sekretariat Itjen
85.	Andi Yoga Trihartanto	199004032008121001	Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
86.	Faradina Salsabil	199207072014112002	Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF
87.	Raphael Gunawan Hasudungan	199205052014111003	Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF
88.	Agus Suharsono	196912311995031001	Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)
89.	David Syam Budi Bakroh	198609132007011001	Sekretariat BPPK
90.	Elvira Andriyani	198811212009122002	Sekretariat BPPK
91.	Oktavia Ester Pangaribuan	197110151992032001	BDK Cimahi, BPPK
92.	Sayekti Dewi Anggraeni	198706162010122004	Pusdiklat Keuangan Umum, BPPK

B. KOORDINATOR DUTA TRANSFORMASI

No.	Nama	NIP	Unit Kerja
1.	Citra Handayani Nasruddin	198501302010122005	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Setjen
2.	M. Lucky Akbar	197807052002121003	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Setjen
3.	Fitri Mayang Sari	198904222009122001	Direktorat Sistem Penganggaran, DJA
4.	Asyhadi Munir	196903041988121001	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, DJP
5.	Delfiana Primashinta Iskandar	198705062014022002	KPP Wajib Pajak Besar Dua, DJP

10.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Nama	NIP	Unit Kerja
6.	Ery Sunandar	197406171996021001	Kanwil DJP Sumut II, DJP
7.	Jessica Winda Prima	199112312014022002	KPP Pratama Solok, DJP
8.	Kawas Rolant Tarigan	198608132008121001	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, DJP
9.	Kirana Tiarasari	198804302012102001	KPP Pratama Metro, DJP
10.	Muflih Fathoniawan	199109162013101003	Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makassar, DJP
11.	Swartoko	197111161992011002	Kanwil DJP Jawa Barat III, DJP
12.	Bety Ijani Harmawaty	196906241996032002	KPPBC TMP A Bandung, DJBC
13.	Wahyu Purwanto	197401261994021002	Direktorat Fasilitas Kepabeanan, DJBC
14.	Andhita Vidya Putri	198409082006022001	Sekretariat DJPBN
15.	Andika Rohman Prasetya	198906232010121002	Direktorat Sistem Perbendaharaan, DJPBN
16.	Sigid Mulyadi	197606171996021003	Sekretariat DJPBN
17.	Yogi Bekti Swasana	197503281999031001	KPPN Amlapura, DJPBN
18.	Tiar Nurita Qadarsih	198904292014022005	Sekretariat DJKN
19.	Asep Agus Hermanto	198209102004121001	Sekretariat DJPK
20.	Kresia Ramadanty	198306252004122001	Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
21.	Nanang P. Ernawan	198307072006021001	Sekretariat Itjen
22.	Tri Ongko Bayu Sadewo	199402082014111001	Sekretariat BKF
23.	Hendra Sahputra	198508232004121005	Sekretariat BPPK Keuangan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

